

Peran Singapura dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)

Euis Putri Rahmadhani¹, Muhammad Yusra²

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹euisputri2910@gmail.com, ²muhammadyusra@soc.unand.ac.id

Abstract

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) is an agreement in Southeast Asia initiated by Singapore that aims to facilitate cross-border e-commerce cooperation in the region. This research analyzes the role of Singapore in the ASEAN Agreement on Electronic Commerce. The research method used is qualitative with descriptive and exploratory research using primary and secondary data. This research uses National Role Conceptions by K.J. Holsti to analyze the role of Singapore in AAEC. The researchers identify four national role conceptions, such as regional leader, regional-subsystem collaborator, developer, and example. Singapore's role as a regional leader is evidenced by Singapore leading the e-commerce task force in the region and initiating the AAEC. Role as a regional-subsystem collaborator, Singapore shows a commitment to establishing cooperation between ASEAN member states and aims to achieve common interests through AAEC. Singapore collaborated with Malaysia and Brunei Darussalam in the e-commerce task force. Singapore actively cooperates with other ASEAN member states to implement the area of cooperation in AAEC. Singapore's role as the developer has developed Singapore Cooperation Centres in Vietnam, Cambodia, and Lao PDR aims to give training and workshops about e-commerce. The role as example, Singapore is a country with the most advanced e-commerce infrastructure in the region and becoming an example for other countries. Singapore inspires other ASEAN member states to support the implementation of AAEC.

Keywords: ASEAN Agreement on Electronic Commerce, Southeast Asia, E-Commerce, National Role Conceptions, Singapore.

PENDAHULUAN

Meningkatnya perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara berkontribusi pada tingginya adopsi teknologi terutama pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan menghadirkan *platform e-commerce* lintas batas (World Bank Group, 2019). Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan akses dan penggunaan internet yang semakin masif di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di kawasan ini mencapai 460 juta pengguna

(ASEAN Socio-Cultural Community Department, 2022). Lebih dari 50% penduduk di Asia Tenggara merupakan generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap teknologi dan transaksi berbasis internet. Ekonomi internet negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) diproyeksikan menyentuh angka US\$240 miliar pada tahun 2025 (Sengpunya, 2019).

Kawasan Asia Tenggara menjadi pusat global bagi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dan *platform e-commerce*. Dari tahun 2018 hingga 2023, pertumbuhan tahunan pendapatan *e-commerce* di ASEAN diproyeksikan mencapai 4 kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) regional. Total pendapatan *e-commerce* ASEAN akan meningkat hampir 200% (Chen, 2020). Google dan Temasek Holding memperkirakan penjualan melalui *e-commerce* di kawasan ini mencapai US\$88 miliar pada tahun 2025 (Pertiwi, 2019).

ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara melihat kondisi tersebut sebagai peluang, sehingga ASEAN menyusun serangkaian perjanjian dan kerangka kerja sama dengan negara anggotanya terkait *e-commerce*. Pembahasan tersebut sudah dimulai sejak tahun 1999 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal ke-3 di Manila, Filipina yang membahas terkait *e-ASEAN Framework Agreement*. *E-ASEAN Framework Agreement* ditandatangani di Singapura, 24 November 2000 bertepatan pada agenda KTT Informal ASEAN ke-4 dan menjadi pijakan awal pembentukan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*. Pasal 5 *e-ASEAN Framework Agreement* mendorong negara anggota untuk mengadopsi regulasi terkait *e-commerce* dengan menerapkan kebijakan domestiknya mengenai *e-commerce*.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura mendominasi perkembangan *e-commerce* dibandingkan negara-negara lainnya. Sejak tahun 1980, Singapura sudah memiliki visi untuk menjadi *International Electronic Commerce Hub* yaitu pusat aktivitas *e-commerce* di kawasan dan global (Cao, 2019). Singapura kemudian mengeluarkan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan *e-commerce* pada

tahun 1996 melalui program *E-Commerce Hotbed*. Pada tahun 1998, Singapura mengeluarkan *Electronic Commerce Masterplan*. Maka tidak heran jika saat ini Singapura memiliki seperangkat infrastruktur *e-commerce* yang paling lengkap dan memadai dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya.

Singapura terlibat aktif dalam perjanjian dan kerangka kerja sama mengenai perdagangan digital dan *e-commerce*. Hingga saat ini, Singapura terlibat dalam 4 perjanjian ekonomi digital yaitu *Digital Economy Partnership Agreement* (DEPA) bersama Chili dan Selandia Baru, *Singapore-Australia Digital Economy Agreement* (SADEA), *United Kingdom-Singapore Digital Economy Agreement* (UKSDEA), dan *Korea-Singapore Digital Partnership Agreement*. Singapura juga menjadi *leading force* terkait regulasi *e-commerce* dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), serta *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC). Singapura juga memimpin pembicaraan dengan mitra dialog ASEAN terkait ekonomi digital (Elms, 2024). Komitmennya dalam mendorong kerja sama tersebut bertujuan untuk menyelaraskan aturan dan standar digital, memfasilitasi interoperabilitas antara sistem digital, mendukung aliran data lintas batas, melindungi hak pribadi konsumen, serta mendorong kerja sama mitra ekonomi Singapura di bidang *Artificial Intelligence* (AI) (CSIS, 2022).

Pada tahun 2018, Singapura menjadi ketua ASEAN dengan tema ASEAN yang Tangguh dan Inovatif. Pada masa kepemimpinannya, Singapura mendorong 5 agenda prioritas, salah satunya mempromosikan kerja sama ASEAN terkait *e-commerce*. Singapura berhasil memanfaatkan kepemimpinannya untuk menetapkan agenda yang mendorong kerja sama ASEAN di bidang *e-commerce*. Oleh karena itu, Singapura di akhir masa kepemimpinannya memprioritaskan agar AAEC ditandatangani (Yean, 2019).

Perbincangan terkait AAEC melewati 9 putaran negosiasi yang dimulai pada Juni 2017 dan mengadopsi *ASEAN Work Programme on Electronic Commerce*

(AWPEC) 2017-2025. Program kerja ini berisi langkah-langkah untuk memfasilitasi *e-commerce* lintas batas di kawasan Asia Tenggara, termasuk pengembangan AAEC pada tahun 2018. Pada KTT ASEAN ke-32 tahun 2018 di Singapura, AAEC pun ditetapkan.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dalam agenda KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada 12 November 2018. AAEC kemudian ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara/Pemerintah anggota ASEAN di Ha Noi, Vietnam pada 22 Januari 2019. Pada Desember 2021, AAEC secara resmi berlaku untuk diimplementasikan.

Singapura terlihat cukup aktif dalam mendorong dan menginisiasi kerja sama *e-commerce* di level global dan regional, terutama ketika ASEAN berada di bawah kepemimpinannya. Singapura mendorong agenda prioritas terkait kerja sama *e-commerce* dan penandatanganan AAEC. Melihat fakta tersebut, menarik untuk dianalisis bagaimana peran yang dilakukan oleh Singapura dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan metode kualitatif (Creswell dan Creswell, 2018). Jenis penelitian ini dipilih guna mengeksplorasi dan menganalisis mengenai bagaimana peran Singapura dalam AAEC. Penelitian ini dibatasi pada rentang tahun 2017 hingga tahun 2021. Pembahasan terkait AAEC dimulai pada tahun 2017 dan diimplementasikan pada tahun 2021.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan meliputi *opening remarks* Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, *chairman's statement* pada KTT ASEAN, serta *press release* pada *WTO Joint Statement Initiative on E-Commerce*. Penelitian ini juga memanfaatkan data dari akun media sosial seperti Instagram dan Youtube Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura @mti_sg dan

@MTIOfSingapore, Kementerian Luar Negeri Singapura @mfa_sg dan @mfasingapore, Singapore Economic Development Board @singapore_edb dan @SingaporeEDB, ASEAN @asean dan @aseansecretariatofficial, UNCTAD @unctad dan @UNCTADOnline, serta WTO @worldtradeorganization dan @WTO. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga turut menggunakan data sekunder yang berasal dari laman resmi, sumber berita daring, buku, serta artikel jurnal. Penulis menggunakan beberapa kata kunci seperti *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, Asia Tenggara, *e-commerce*, konsepsi peran nasional, dan Singapura. Kata kunci yang dipilih memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana peran Singapura dalam AAEC.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merujuk pada berbagai literatur yang relevan dengan penelitian penulis, salah satunya adalah artikel jurnal karya Phet Sengpunya yang berjudul *ASEAN E-Commerce Legal Framework-Towards the Development and Prospects*. Tulisan ini membantu peneliti mendapatkan gambaran mengenai perkembangan regulasi terkait *e-commerce* di ASEAN hingga lahirnya AAEC. Sengpunya dalam tulisannya menjelaskan terkait *Hanoi Plan of Action*, *e-ASEAN Framework Agreement*, serta AAEC. *Hanoi Plan of Action* diluncurkan dan mendorong negara anggota ASEAN untuk menciptakan kebijakan yang memfasilitasi *e-commerce* lintas batas dan menjadi rencana aksi pertama mengenai pengembangan regulasi *e-commerce* di ASEAN. Setelah *Hanoi Plan of Action*, *e-ASEAN Framework Agreement* ditandatangani pada 24 November 2000 yang bertujuan untuk memulai upaya kolektif yang menghubungkan ASEAN ke dalam jaringan ekonomi global dengan mencapai kesiapan digital.

Kemudian didasarkan pada pasal 5 *e-ASEAN Framework* dan *AEC Blueprint 2025*, *ASEAN Work Programme on E-Commerce* diluncurkan pada November 2018 yang mendorong ASEAN untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam *e-commerce* dengan membentuk ASEAN untuk memfasilitasi transaksi *e-commerce* lintas batas, berkontribusi dalam membangun lingkungan

kepercayaan dalam penggunaan *e-commerce*, serta mempererat kerja sama untuk mengembangkan dan meningkatkan *e-commerce* di ASEAN. Artikel ini memberikan gambaran kepada penulis mengenai perkembangan regulasi terkait *e-commerce* di ASEAN hingga lahirnya AAEC (Sengpunya, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Singapura sebagai *Regional Leader* dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC)

Negara yang berperan sebagai *regional leader* artinya memiliki tanggung jawab khusus terhadap suatu kawasan dan memiliki kecenderungan terhadap suatu isu dalam kawasan tersebut. Hal tersebut tercermin dari langkah yang diambil oleh suatu negara dalam menginisiasi kerja sama kawasan dan membentuk kebijakan bersama (Holsti, 1970).

Peran Singapura sebagai *regional leader* dalam AAEC tercermin dari perannya sebagai pemimpin gugus tugas *e-commerce* di kawasan Asia Tenggara, memiliki kecenderungan pada isu *e-commerce*, dan langkahnya yang menginisiasi kerja sama *e-commerce* di ASEAN yaitu AAEC. Singapura bertanggung jawab untuk memimpin gugus tugas *e-commerce* yang dibentuk guna mewujudkan tugas *e-ASEAN*. Gugus tugas ini diinisiasi pada 28 November 1999 dalam agenda KTT Informal ke-3 di Manila, Filipina. Gugus tugas tersebut bertujuan untuk memastikan terlaksananya *e-commerce* di kawasan Asia Tenggara melalui penerapan undang-undang dan kebijakan berdasarkan norma internasional (ASEAN, 1999).

Singapura bertugas untuk mengembangkan kerangka acuan *e-commerce* berdasarkan undang-undang *e-commerce* negara anggota ASEAN yang di dalamnya meliputi undang-undang mengenai transaksi dan tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa secara daring, privasi dan perlindungan data pribadi, sistem pembayaran elektronik, hak kekayaan intelektual, undang-undang dan pencegahan kejahatan siber, pengembangan

kebijakan otentikasi dan keamanan, kerangka kerja pengakuan bersama atas tanda tangan digital, dan kebijakan keamanan (United Nations, 2004).

Kerangka acuan yang menjadi mandat Singapura bertujuan untuk memberikan panduan guna membantu negara anggota seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang saat itu belum memiliki undang-undang terkait *e-commerce*. Selain itu, kerangka ini juga membantu negara anggota yang telah memiliki undang-undang *e-commerce* untuk memfasilitasi *e-commerce* lintas batas dan pengakuan tanda tangan digital.

Infrastruktur *e-commerce* di Singapura menjadi yang paling memadai jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Singapura sudah menaruh perhatian lebih terkait isu *e-commerce*, baik di level domestik, regional, hingga global sejak tahun 1980 (Cao, 2019). Sudah cukup banyak regulasi dan upaya kerja sama kawasan yang diinisiasi oleh Singapura. Inisiasi ini sudah dimulai sejak tahun 1999 ketika *e-ASEAN* diluncurkan pada *ASEAN Economic Minister Meeting* ke-31 di Singapura (ASEAN, 1999). *E-ASEAN* yang merupakan cikal bakal terbentuknya AAEC ditandatangani dan diadopsi pada 25 November 2000 dalam agenda KTT Informal ke-4 di Singapura (ASEAN, 2000).

Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong dalam pernyataannya pada agenda *Telecommunications and IT Ministers Meeting* (TELMIN) ke-3 tahun 2003 di Singapura, menekankan untuk mempercepat realisasi *ASEAN Connected* dibutuhkan akses infrastruktur TIK yang tersebar luas, karena dengan meningkatnya akses ke TIK akan mengarah pada pertumbuhan *e-commerce* serta mendorong integrasi ekonomi yang lebih erat di ASEAN (National Archives of Singapore, 2003). Selain itu, ASEAN juga ditekankan agar berkomitmen untuk mempromosikan dan memfasilitasi *e-commerce* serta harus memiliki regulasi terkait *e-commerce* yang jelas dan transparan yang dikembangkan melalui harmonisasi undang-undang dan kebijakan berdasarkan norma-norma internasional, guna meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan pelaku bisnis (ASEAN, 2003).

Peran Singapura sebagai *regional leader* juga terefleksi ketika Singapura menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-32 dan ke-33. Singapura mendorong agar AAEC ditetapkan dan langsung ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada 12 November 2018 (ASEAN, 2018). Inisiatif tersebut sejalan dengan agenda prioritas Singapura ketika menjadi ketua ASEAN tahun 2018 yaitu mendorong agar AAEC ditandatangani di akhir masa kepemimpinannya (Yean, 2019).

Sejumlah langkah dan inisiatif yang dilakukan Singapura dalam mendorong AAEC di kawasan menunjukkan peranannya sebagai *regional leader*. Langkah awalnya dimulai ketika Singapura mendorong *e-ASEAN* tahun 1999 untuk ditandatangani dan diadopsi pada tahun 2000. Pada TELMIN ke-3 tahun 2003 sebagai langkah lanjutannya, Singapura menekankan agar ASEAN memiliki regulasi yang mengatur *e-commerce* lintas batas di Asia Tenggara. Singapura juga menjadi gugus tugas *e-commerce* yang bertugas untuk mengembangkan kerangka acuan *e-commerce* di negara anggota ASEAN lainnya, menjadikan isu *e-commerce* dan AAEC sebagai agenda pembahasan dalam KTT ASEAN ke-32 dan ke-33, hingga memprioritaskan agar AAEC ditandatangani di akhir masa kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN tahun 2018. Inisiatif Singapura tersebut menggambarkan komitmennya dalam memimpin kerja sama terkait *e-commerce* di Asia Tenggara sekaligus menunjukkan perannya sebagai *regional leader* melalui AAEC guna mencapai kepentingan bersama.

Peran Singapura sebagai *Regional-Subsystem Collaborator* dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*

Negara yang berperan sebagai *regional-subsystem collaborator* menunjukkan komitmennya untuk ikut aktif dalam kerja sama di kawasan dan menjalin hubungan dengan negara lain guna mencapai kepentingan bersama. Selain itu, peran ini menunjukkan negara yang aktif dalam mempromosikan kerja sama (Holsti, 1970). Singapura menunjukkan perannya sebagai *regional-subsystem collaborator* karena berkomitmen dalam mendorong kerja sama kawasan terkait

e-commerce dan secara aktif mempromosikan serta melakukan kerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Saat memimpin gugus tugas *e-commerce*, Singapura bekerja sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kerangka acuan *e-commerce* yang dikembangkan juga berasal dari undang-undang di negara anggota yang sudah memiliki regulasi terkait *e-commerce*, seperti *Electronic Transactions Act of Singapore*, *Digital Signature Act of Malaysia*, *Electronic Commerce Act of Philippines*, *Electronic Transaction Order of Brunei Darussalam*, dan *Draft Electronic Transactions Bill of Thailand* (United Nations, 2004).

Tidak hanya bekerja sama ketika memimpin gugus tugas *e-commerce*, Singapura juga turut aktif menjalin kerja sama dan memperkuat hubungannya dengan negara anggota ASEAN lainnya khususnya terkait bidang-bidang atau aspek yang terdapat dalam AAEC, mulai dari pembayaran elektronik lintas batas, logistik dan fasilitasi perdagangan, serta bidang kerja sama lainnya.

Pada 29 April 2021, Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Bank of Thailand (BOT) meluncurkan sistem pembayaran *real-time* pertama di dunia yang akan memfasilitasi transfer lintas batas yang lebih cepat dan murah. Kolaborasi ini melibatkan PayNow di Singapura dan PromptPay di Thailand yang memungkinkan pengguna di kedua negara tersebut untuk mentransfer dana secara langsung hanya menggunakan nomor ponsel. Pengguna dapat mentransfer hingga S\$1.000 atau TBH25.000 setiap harinya (Bank of Thailand, 2021).

PayNow dan PromptPay memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen di kedua negara untuk melakukan transaksi lintas batas. Kolaborasi ini merupakan permulaan, karena MAS dan BOT bertujuan untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya guna memperluas jaringan sistem pembayaran lintas batas yang terhubung di seluruh kawasan (Monetary Authority of Singapore, 2021). Kemudian pada Juli 2021, Singapura dan Thailand menandatangani MoU mengenai ekonomi digital. MoU ini menekankan kerja

sama dalam upaya peningkatan konektivitas digital, keamanan siber, serta mempromosikan aliran data lintas batas (Koty, 2022).

Tidak hanya itu, MAS dan Banko Sentral ng Philipinas (BSP) turut menandatangani *Fintech Cooperation Agreement*. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 8 November 2021 ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas antara Singapura dan Filipina. Sama halnya dengan perjanjian pembayaran lintas batas dengan negara lainnya, perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi sistem pembayaran *real-time* antara kedua negara guna menciptakan pembayaran lintas batas yang praktis dan dengan biaya rendah (Monetary Authority of Singapore, 2021). Kerja sama antara kedua negara ini sejalan dengan AAEC yang mendorong regulasi dan kerja sama pembayaran lintas batas, sehingga dapat memfasilitasi *e-commerce*. Langkah Singapura menunjukkan peranannya sebagai *regional-subsystem collaborator* karena secara aktif bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya guna mencapai kepentingan bersama.

Peran Singapura sebagai *regional-subsystem collaborator* juga tercermin dari kerja sama yang dijalin dengan Malaysia melalui penandatanganan *Mutual Recognition Arrangement (MRA) Authorised Economic Operator (AEO)* pada 18 Januari 2024. MRA ini memungkinkan AEO bersertifikat Singapura yang melakukan ekspor ke Malaysia akan diberikan kemudahan saat pemeriksaan bea cukai dan kargo, begitu pun sebaliknya (Singapore Customs, 2024). Kerja sama antar kedua negara ini sebagai wujud dari implementasi AAEC mengenai logistik dan fasilitasi perdagangan. Sebagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia, maka kedua negara ini juga turut menandatangani MoU tentang *Johor-singapore Special Economic Zone (JS-SEZ)* pada tahun 2024. Inisiatif ini guna meningkatkan perdagangan lintas batas dan konektivitas ekonomi antar kedua negara (Interesse, 2024).

Tidak hanya bekerja sama dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia, Singapura juga turut menjalin hubungan kerja sama dengan Vietnam melalui

penandatanganan MoU untuk kolaborasi ekonomi digital antar kedua negara yang meliputi aspek seperti konektivitas, inovasi digital, dan infrastruktur (Medina, 2023). Singapura melalui IAI melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas di Vietnam yang disebut Vietnam-Singapore Training Centre (VSTC). Pada tahun 2019, pusat pelatihan tersebut pun kemudian ditingkatkan menjadi Vietnam-Singapore Cooperation Centre (VSCC) (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022). Pelatihan ini sebagai wujud dari implementasi AAEC di ruang lingkup pelatihan dan kompetensi teknologi, di mana kerja sama ini berupaya untuk pengembangan kapasitas di kawasan.

Kolaborasi Singapura dengan negara-negara anggota ASEAN di berbagai ruang lingkup yang didorong dalam AAEC merupakan wujud komitmennya dalam menjalin hubungan kerja sama sebagai *regional subsystem-collaborator*. Peran ini menekankan pada kolaborasi yang dijalin guna mencapai kepentingan bersama khususnya di bidang AAEC.

Selain menekankan pada komitmennya dalam menjalin kerja sama guna mencapai kepentingan bersama, peran ini juga menunjukkan upaya negara yang aktif dalam mempromosikan kerja sama. Singapura yang selalu aktif menyuarakan isu *e-commerce* di setiap pertemuan rutin negara-negara ASEAN merupakan bentuk Singapura mempromosikan pembentukan AAEC. Tidak hanya mempromosikan AAEC di ruang lingkup regional, Singapura juga turut mempromosikan AAEC di level global seperti yang dilakukan dalam *UNCTAD E-Commerce Week* di Jenewa, Swiss tahun 2018.

Pada pertemuan yang mengusung tema *Towards an ASEAN Agreement on E-Commerce* ini dihadiri oleh beberapa negara anggota ASEAN sekaligus sebagai pembicara yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos. Pembahasan pada agenda tersebut adalah mengenai AAEC yang akan segera ditandatangani pada akhir tahun 2018, dan berbagi pengalaman serta mempromosikan inisiatif negara-negara ASEAN menuju kesiapan *e-commerce* (UNCTAD, 2018). Tidak hanya

negara-negara tersebut, *Economic Affairs Officer* UNCTAD, *Director General* Global Express Alliance pun turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Peran Singapura sebagai *Developer* dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*

Negara yang berperan sebagai *developer* merujuk pada tindakannya yang membantuu negara-negara kurang berkembang dalam upayanya mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini dianggap sebagai sebuah kepentingan nasional dan dapat berdampak pada jangka waktu yang panjang bagi negara tersebut (Holsti, 1970). Singapura turut memainkan perannya sebagai *developer* dalam AAEC. Terlihat dari tujuan Singapura yang mendorong pembentukan AAEC agar dapat memfasilitasi transaksi *e-commerce* lintas batas secara menyeluruh di setiap negara di kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali negara-negara yang masih tergolong sebagai negara kurang berkembang seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Adanya AAEC dapat mengembangkan dan mengintensifkan penggunaan *e-commerce* guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sehingga dapat mencapai kepentingan bersama (Ministry of Trade and Industry Singapore, 2018).

Pada KTT Informal ASEAN ke-4 sekaligus saat Singapura menjadi ketua ASEAN tahun 2000, Singapura meluncurkan *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*. IAI bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN serta meningkatkan integrasi regional. Singapura merupakan kontributor terbesar IAI dan telah menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan untuk pengembangan kapasitas bagi lebih dari 43.000 orang dari negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) (Singapore Cooperation Programme, 2024).

Initiative for ASEAN Integration (IAI) Workplan IV tahun 2021-2025 telah dikembangkan yang selaras dengan *ASEAN Community Vision 2025* dan rencana kerja sektoral lainnya. Rencana kerja ini disusun dengan menyesuaikan perkembangan baru dan tren lain yang muncul dalam 5 tahun ke depan, sehingga program-program yang disediakan di pusat IAI telah berubah sesuai dengan

kebutuhan saat ini seperti peningkatan adopsi digital UKM termasuk penggunaan *e-commerce* di dalamnya (ASEAN Secretariat, 2020).

Pada Agustus 2018, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan bahwa Singapura akan meningkatkan pusat *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) yang ada di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk menjadi Singapore Cooperation Centres (SCCs). Langkah ini merupakan bagian dari upayanya untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional yang lebih luas dan adopsi teknologi di negara anggota ASEAN (Wen, 2018).

Singapura mendirikan Laos-Singapore Cooperation Centre dan mulai dibuka pada Januari 2019 (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2021). Menyusul Laos, Vietnam-Singapore Cooperation Centre (VSCC) yang sebelumnya Vietnam-Singapore Training Centre (VSTC) pun secara resmi diluncurkan pada 23 Maret 2019 (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022). Lebih lanjut, Cambodia-Singapore Cooperation Centre (CSCC) yang juga berada di bawah naungan *IAI Integration* secara resmi dibuka pada 2 Agustus 2022 (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022).

Pelatihan dalam Singapore Cooperation Centre ini cukup beragam, termasuk di dalamnya mengenai ekonomi digital, *fintech*, AI, keamanan siber, serta *e-commerce*. Melalui program pelatihan ini, Singapura bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan terkait *e-commerce* bagi negara-negara kurang berkembang seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh Singapura, dapat mendorong percepatan kesiapan negara-negara tersebut dalam implementasi AAEC.

Peran Singapura sebagai *Example* dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC)

Peran negara sebagai *example* menekankan pada posisinya yang berpengaruh dalam sistem internasional melalui kebijakan yang diambil. Negara yang memiliki peranan ini terefleksi dari langkah atau tindakannya yang mampu

menjadi contoh bagi negara lain terutama pada isu tertentu. Seringkali negara yang berperan sebagai *example* memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan negara lainnya atau memiliki pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan masalah di kawasan (Holsti, 1970).

Setelah ditandatangani pada 22 Januari 2019, tidak butuh waktu lama bagi Singapura untuk meratifikasi AAEC. Singapura menjadi salah satu negara pertama yang meratifikasi AAEC yaitu pada 15 Juli 2019, kemudian diikuti oleh negara anggota lainnya. Dalam ruang lingkup AAEC, keamanan siber merupakan salah satu aspek di dalamnya. Dibandingkan dengan negara anggota lainnya, Singapura sudah lebih dulu merumuskan *Cyber Security Bill* atau Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber pada 5 Februari 2018 dan disahkan menjadi *Cybersecurity Act* pada 2 Maret 2018 (CSA Singapore, 2025). Negara anggota lainnya seperti Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia turut mengikuti langkah Singapura dengan mengesahkan *Cybersecurity Act* di masing-masing negaranya.

Selain keamanan siber, pembayaran elektronik juga menjadi perhatian dalam AAEC. Di Asia Tenggara, Singapura merupakan pasar pembayaran digital paling memadai. Penetrasi dompet digital di Singapura menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 23,3%, kemudian diikuti oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand (World Bank Group, 2019).

Kebijakan yang diambil oleh Singapura, seperti menjadi negara pertama yang meratifikasi AAEC, pembentukan regulasi terkait keamanan siber di *e-commerce*, serta tingginya penetrasi dompet digital berhasil memberikan pengaruh sekaligus menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan serupa. Hal tersebut yang menunjukkan peranan Singapura sebagai *example* dalam AAEC.

Negara yang berperan sebagai *example* seringkali merupakan negara yang memiliki perekonomian lebih baik dibandingkan negara lainnya. Singapura menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan PDB

S\$673 miliar pada tahun 2023 (Ministry of Trade and Industry Singapore, 2024). Perekonomian Singapura sangat bergantung pada sektor perdagangan. Pertumbuhan PDB Singapura didominasi oleh industri jasa sebesar 70% dari total PDB. Singapura berada pada urutan ke-10 sebagai negara dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita tertinggi sekaligus sebagai negara paling maju dalam pengembangan sumber daya manusia (World Bank Group, 2024).

Publikasi dari World Bank juga menjelaskan bahwa Singapura adalah ekonomi dengan kinerja terbaik di kawasan Asia Tenggara dan berada di peringkat ke-24 secara global dengan skor 78%. Persentase tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi atau *high skilled* di Asia Tenggara didominasi oleh Singapura. Sebaliknya, tenaga kerja dengan keterampilan rendah atau *low skilled* hanya sebesar kurang dari 10% di Singapura. Pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi meningkat di Asia Tenggara yang menandakan bahwa tenaga kerja di kawasan ini semakin terlatih dan dapat memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital.

Jika dilihat dari segi infrastruktur *e-commerce*, Singapura menjadi yang paling unggul di kawasan dan telah mencapai tingkat implementasi fasilitasi perdagangan yang paling tinggi. Hal ini jelas menjadikannya sebagai salah satu pemimpin bagi negara-negara berkembang. Lalu disusul oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang tingkat implementasinya lebih dari 80% (Cao, 2019).

Berangkat dari karakteristik yang menunjukkan peran suatu negara sebagai *example* yang sudah dijelaskan di atas, di mana peran ini menekankan pada posisi suatu negara yang berpengaruh dalam sistem internasional, tindakan atau langkah yang diambil terhadap suatu isi yang menjadi contoh, serta memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan negara lainnya. Seluruh karakteristik tersebut berhasil diidentifikasi pada peran Singapura sebagai *example* dalam AAEC.

Singapura merupakan negara yang perekonomiannya lebih baik dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, ditambah lagi dengan regulasi dan infrastruktur terkait *e-commerce* yang paling maju di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat Singapura memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan terutama dalam isu *e-commerce*. Pada beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup kerja sama AAEC, Singapura menunjukkan langkah yang diambil menjadi contoh lalu diikuti oleh negara anggota lainnya, seperti dalam hal penyusunan rancangan undang-undang keamanan siber, hingga penetrasi dompet digital sebagai alat pembayaran elektronik. Selain itu, ketika Singapura menjadi salah satu negara pertama yang meratifikasi AAEC, tidak lama kemudian negara-negara anggota lainnya pun turut meratifikasi.

KESIMPULAN

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) merupakan sebuah perjanjian *e-commerce* di ASEAN. AAEC diinisiasi pada tahun 2017 dan ditandatangani tahun 2018 dalam KTT ASEAN ke-33 di Singapura. Singapura memiliki andil yang besar dari awal AAEC diinisiasi hingga diimplementasikan di ASEAN. Jika dilihat dari konsepsi peran nasional menurut K.J. Holsti, Singapura menunjukkan beberapa peranannya dalam AAEC yaitu sebagai *regional leader*, *regional subsystem-collaborator*, *developer*, dan *example*.

Peran Singapura sebagai *regional leader* terefleksi ketika memimpin gugus tugas *e-commerce* di Asia Tenggara dan mendorong inisiasi AAEC. Sebagai *regional subsystem-collaborator*, Singapura menunjukkan peranannya melalui komitmen dalam menjalin hubungan kerja sama di bidang *e-commerce* dengan negara anggota ASEAN lainnya. Singapura juga turut aktif dalam mempromosikan AAEC. Singapura berperan sebagai *developer*, di mana terlihat bahwa Singapura membantu negara-negara CLMV di bidang *e-commerce* melalui Singapore Cooperation Centres (SCCs). Berperan sebagai *example* dalam AAEC, Singapura mampu menjadi contoh di bidang *e-commerce* bagi negara anggota ASEAN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Socio-Cultural Community Department. "The ASEAN: Digital Transformation", *The ASEAN Secretariat ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Department*, November 2022. Diakses pada 27 September 2024, Issue-23-Digital-Transformation-digital-version.pdf (asean.org).
- ASEAN. 1999. "Chairman's Press Statement on ASEAN 3rd Informal Summit Manila, Philippines, 28 November 1999." <https://asean.org/chairmans-press-statement-on-asean-3rd-informal-summit-manila-philippines-28-november-1999/>.
- ASEAN. 2000. "The Fourth ASEAN Informal Summit 22-25 November 2000, Singapore." <https://asean.org/the-fourth-asean-informal-summit-22-25-november-2000-singapore/>.
- ASEAN. 2003. "Joint Media Statement of the 3rd ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting, Singapore." <https://asean.org/joint-media-statement-of-the-3rd-asean-telecommunications-and-information-technology-ministers-meeting-singapore/>.
- ASEAN. 2018. "Chairman's Statement of the 33rd ASEAN Summit." https://asean.org/wp-content/uploads/2018/11/33rd_ASEAN_Summit_Chairman_s_Statement_Final.pdf.
- Bank of Thailand. 2021. "Thailand and Singapore Launch World's First Linkage of Real-time Payment Systems." https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/en/news-and-media/news/2021/JointPress29042021_EN.pdf.
- Cao, Zang. "E-Commerce in Singapore and Indonesia: Comparison of Policies." *International Journal of Science and Society* 1, no. 1 (2019).
- Center for Strategic and International Studies (CSIS): *Research Report The Indo-Pacific Economic Framework & Digital Trade in Southeast Asia* (CSIS, 2022), <https://www.jstor.org/stable/resrep41411>.
- Chen, Lurong. *Improving Digital Connectivity for E-Commerce: A Policy Framework and Empirical Note*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), 2020.

Creswell, John W, dan J. David Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

CSA Singapore. 2025. "Cybersecurity Act." <https://www.csa.gov.sg/legislation/Cybersecurity-Act#:~:text=The%20Cybersecurity%20Bill%20was%20passed,of%20national%20cybersecurity%20in%20Singapore.>

Elms, Deborah: *Final Report Study on the Potential Impact of a Future EU-Singapore Digital Trade Agreement* (GOPA, 2024), 1-39, Microsoft Word - EUSDTA Final Report June 2024_comment lxu (jw jl) (europa.eu).

Holsti, K.J. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970).

Interesse, Giulia. 2024. "Malaysia-Singapore Economic Relations: Trade and Investment Outlook." <https://www.aseanbriefing.com/news/malaysia-singapore-economic-relations-trade-and-investment-outlook/>.

Koty, Alexander Chipman. 2022. "Thailand and Singapore Sign Agreements to Deepen Economic Cooperation." <https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-and-singapore-sign-agreements-to-deepen-economic-cooperation/>.

Medina, Ayman Falak. 2023. "Singapore and Vietnam Sign MoUs to Enhance Economic Cooperation." <https://www.aseanbriefing.com/news/singapore-and-vietnam-sign-mous-to-enhance-economic-cooperation/>.

Medina, Ayman Falak. 2024. "Instant Mobile Transfers from Singapore to Four Countries: A Breakthrough in Cross-Border Payments." <https://www.aseanbriefing.com/news/instant-mobile-transfers-from-singapore-to-four-countries/>.

Ministry of Foreign Affairs Singapore. 2021. "Singapore Technical Cooperation Programme with Lao PDR." <https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Vientiane/Singapore-Technical-Cooperation-Programme-with-Lao-PDR.>

Ministry of Foreign Affairs Singapore. 2022. "Celebration of the 30th Anniversary of the Singapore Cooperation Programme and Alumni Reception."

<https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Hanoi/Mission-Updates/2022/12/Media-Release-for-SCP-30th-Anniversary>.

Ministry of Foreign Affairs Singapore. 2022. "Official Opening of the Cambodia-Singapore Cooperation Centre." <https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Phnompenh/Mission-Updates/2022/08/Press-Statement-on-the-Official-Opening-of-the-Cambodia-Singapore-Cooperation-Centre>.

Ministry of Trade and Industry Singapore. 2018. "Opening Remarks by Minister Chan Chun Sing for the ASEAN Agreement on Electronic Commerce." <https://www.mti.gov.sg/te-IN/Newsroom/Speeches/2018/11/Opening-remarks-for-the-ASEAN-Agreement-on-Electronic-Commerce>.

Ministry of Trade and Industry Singapore. *Economic Survey of Singapore 2023*. Singapura: Ministry of Trade and Industry Republic of Singapore, 2024.

Monetary Authority of Singapore. 2021. "MAS and BSP to Pursue Cross-border Payment Linkages." <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/mas-and-bsp-to-pursue-cross-border-payment-linkages#>.

Monetary Authority of Singapore. 2021. "Singapore and Thailand Launch World's First Linkage of Real-time Payment Systems." <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/singapore-and-thailand-launch-worlds-first-linkage-of-real-time-payment-systems>.

National Archives of Singapore. 2003. "Speech by Prime Minister Goh Chok Tong, at The Official Opening of the Third ASEAN Tele-communications and IT Ministers Meeting (TELMIN)." <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdffdoc/2003091804.htm>.

Pertiwi, Sukmawani Bela, Amalia Sustikarini, dan Paramitaningrum Paramitaningrum. "The Impacts of E-Commerce to Regional Integration in Southeast Asia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 2 (2019).

Sengpunya, Phet. "ASEAN E-Commerce Legal Framework - Towards the Development and Prospects." *Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal* 10, no. 2 (2019).

Singapore Cooperation Programme. 2024. "Initiative for ASEAN Integration (IAI)." https://scp.gov.sg/startpublic/courses/clusters/CLS_8/%23/0/0/.

Singapore Customs. 2024. "Certified Companies to Enjoy Reduced Customs Checks for Goods Traded Between Singapore and Malaysia." https://www.customs.gov.sg/files/2024_01_23_media_release.pdf.

The ASEAN Secretariat. *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan IV (2021-2025)*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2020.

UNCTAD. 2018. "Towards an ASEAN Agreement on E-commerce." <https://unctad.org/meeting/towards-asean-agreement-e-commerce>.

United Nations. *Harmonized Development of Legal and Regulatory Systems for E-Commerce in Asia and the Pacific: Current Challenges and Capacity-Building Needs*. New York: United Nations, 2004.

Wen, Lee U. 2018. "Spirit of Sharing and Helping in ASEAN." <https://www.businesstimes.com.sg/incoming/spirit-sharing-and-helping-asean>.

World Bank Group. 2024. "Singapore Overview: Development news, research, data." <https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview>.

World Bank Group. *The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth*. Washington, D.C.: The World Bank, 2019.

Yean, Tham Siew. "ASEAN and E-commerce: Lessons from the Singapore Chairmanship." PANORAMA (2019): 97-99. Dikutip dari Christian Echle, Trade and Economic Connectivity in the Age of Uncertainty (Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2019).